

## **PERAN DINAS SOSIAL SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENANGANI BANTUAN BENCANA LETUSAN GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI DI KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Vinsensius Alfridus Ekho Making<sup>1</sup>, Urbanus Ola Hurek<sup>2</sup>,  
Eusabius Separera Niron<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira  
Kupang Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Email : [kenzogame992@gmail.com](mailto:kenzogame992@gmail.com), [Urbanusola@gmail.com](mailto:Urbanusola@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penanganan bencana alam menuntut adanya koordinasi pemerintahan yang efektif agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Dalam konteks bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam pengelolaan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi faktor kunci dalam memastikan sinergi antarlevel pemerintahan dan antarinstansi terkait. Secara teoretis, koordinasi vertikal memungkinkan keterpaduan kebijakan, pelaporan, dan pengambilan keputusan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sementara koordinasi horizontal memperkuat kerja sama lintas sektor dalam situasi darurat. Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dan horizontal yang berjalan efektif mampu meningkatkan ketertiban distribusi bantuan, mempercepat respons penanganan bencana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi pemerintahan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan penanganan bencana secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci :** Peran, Koordinasi, Dinas Sosial, Gunung Lewotobi Laki-Laki

### **ABSTRACT**

*The management of natural disasters requires effective governmental coordination to ensure that assistance is delivered swiftly, accurately, and accountably. In the context of the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in East Flores Regency, the Social Affairs Office plays a strategic role as the primary coordinator in managing and distributing aid to affected communities. Both vertical and horizontal coordination are key factors in ensuring synergy across different levels of government and among relevant*

*institutions. Theoretically, vertical coordination enables the alignment of policies, reporting mechanisms, and decision-making processes between local and central governments, while horizontal coordination strengthens cross-sectoral collaboration in emergency situations. This study examines the role of the East Flores Regency Social Affairs Office in carrying out these coordination functions using a qualitative approach. The findings indicate that effective vertical and horizontal coordination enhances the orderly distribution of aid, accelerates disaster response efforts, and strengthens public trust in government institutions. These findings underscore that governmental coordination is not merely an administrative mechanism, but a strategic element that determines the sustainable success of disaster management.*

**Keywords:** *Role, Coordination, Social Affairs Office, Mount Lewotobi Laki-Laki*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, itu ditunjukkan dari luas wilayah negara Indonesia dari seluruh negara yang ada di dunia, luas wilayah Indonesia berada pada posisi 15 dunia dengan jumlah luas wilayah daratan dan lautan adalah 1.904.569 km persegi (Karso, 2021). Luas daratan Indonesia mencapai 1,2 % dari luas keseluruhan daratan yang dimiliki bumi saat ini, keadaan tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia saat ini adalah berjumlah sekitar 272.229.372 juta jiwa per juni 2021 (Kurniawan, 2022) (Tempo, 2023).

Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT, di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia bagian dari wilayah monsun Asia–Australia, sehingga sepanjang tahun wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson

barat dan muson timur yang berganti arah kira-kira setiap enam bulan. Kondisi tersebut, bersama posisi Indonesia di sekitar khatulistiwa, menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, tanpa perbedaan musim panas dan dingin yang tegas (Abdi, 2022).

Dari keunikan letak geografis di Indonesia tersebut pada kenyataannya daerah-daerah dan pulau-pulau di Indonesia dilewati oleh daerah yang disebut dengan daerah cincin api (*ring of fire*) sehingga hampir seluruh daerah di seluruh pelosok pulau Indonesia berpotensi mendapatkan bencana gempa bumi dan risiko potensi terjadinya bencana tsunami. Bencana adalah fenomena yang tak terhindarkan oleh manusia dan dapat terjadi kapan saja serta di mana saja, baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Bencana dibagi menjadi tiga kategori: alam, non-alam, dan sosial. Bencana alam disebabkan oleh

peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Salah satu daerah yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap bencana vulkanik adalah Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Gunung Lewotobi terletak di Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Gunung ini dikenal sebagai gunung berapi aktif yang memiliki potensi bahaya besar bagi wilayah sekitarnya, termasuk kawasan pemukiman dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung. Nama Lewotobi yang dalam bahasa lokal memiliki arti "Gunung Laki-laki" menggambarkan kekuatan alam yang besar, dengan karakteristik erupsi yang bisa mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Gunung Lewotobi di Flores Timur meletus pada 29 November 2020 dan berlanjut hingga 2022, dengan ketinggian awan erupsi 1.600 meter, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pengungsian masyarakat. Pada tahun 2023 hingga 2024 menimbulkan dampak besar bagi Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, mulai dari peningkatan status gunung hingga Level IV (Awas), korban jiwa, luka-luka, pengungsian ribuan warga, serta kerusakan rumah, infrastruktur, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Erupsi berulang pada akhir 2023 dan November 2024 menyebabkan gangguan serius terhadap

kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, sehingga bencana ini menjadi persoalan kemanusiaan yang kompleks dan berkelanjutan (https://www.bnpb.go.id/, 2024) (Desember et al., 2023) (Hanifah, 2021)

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah melakukan penanganan bencana secara terkoordinasi berdasarkan kerangka hukum nasional dan daerah, termasuk UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2012. BNPB, kementerian terkait, dan Pemda Flores Timur melalui BPBD serta Dinas Sosial melaksanakan evakuasi, distribusi bantuan, perbaikan infrastruktur, penyediaan hunian sementara, dan perencanaan relokasi, disertai upaya penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Meski demikian, tantangan berupa koordinasi lintas sektor, keterbatasan akses wilayah, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi, dan mitigasi agar penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur telah dilakukan oleh berbagai pihak,

termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, serta lembaga sosial dan relawan. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pokok dan sembako, air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan, peningkatan transportasi logistik, pendirian dapur umum, hunian sementara, serta dukungan psikososial. Peran Dinas Sosial dinilai positif melalui koordinasi lintas pihak, pendistribusian logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara bertahap sesuai prioritas.

Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti meningkatnya jumlah pengungsi, keterbatasan akses ke wilayah terdampak, permasalahan kesehatan, serta ketidakmerataan dan keterlambatan distribusi bantuan. Keluhan masyarakat juga muncul terkait kualitas bantuan, kondisi tempat pengungsian yang tidak memadai, hingga penyalahgunaan bantuan logistik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, transparansi, pengawasan, dan kesiapsiagaan bencana, khususnya oleh Pemda dan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, agar penyaluran bantuan lebih adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran koordinasi pemerintahan dalam penanganan bantuan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik koordinasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial sebagai koordinator utama, baik dalam hubungan hierarkis dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun dalam kerja sama lintas instansi di tingkat daerah. Penelitian dilakukan dalam konteks alamiah tanpa melakukan intervensi terhadap proses penanganan bencana, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dipilih secara selektif dari unsur Dinas Sosial, instansi pemerintah terkait, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan bantuan bencana (Ulber Silalahi, 2012). Wawancara difokuskan pada pengalaman dan praktik koordinasi vertikal dan horizontal, mekanisme komunikasi, pembagian tugas, serta hambatan dan strategi penyelesaian yang diterapkan selama proses penanganan bencana.

Landasan analisis penelitian ini menggunakan teori koordinasi pemerintahan, khususnya konsep koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal (Syafiie, 2011). Koordinasi vertikal dipahami sebagai hubungan kerja yang bersifat struktural dan hierarkis antara pemerintah daerah dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam aspek pelaporan, pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap pedoman teknis. Sementara itu, koordinasi horizontal dipahami sebagai kerja sama fungsional antarinstansi yang setara dalam rangka menyatukan tindakan, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas penanganan bencana.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan pola-pola koordinasi yang terbentuk serta implikasinya terhadap efektivitas penyaluran bantuan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran empiris yang sistematis dan kontekstual mengenai peran koordinasi pemerintahan dalam penanganan bencana, sehingga temuan penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Sosial Sebagai Koordinator Dalam Menangani Bantuan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur, yang dianalisis menggunakan 2 aspek, yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

### **Koordinasi Vertikal**

Aspek koordinasi vertikal dalam peran Dinas Sosial sebagai koordinator penanganan bantuan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur ditunjukkan melalui hubungan kerja yang terstruktur antara pemerintah daerah dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur secara berkala menyampaikan laporan kondisi di lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus sarana penyampaian kebutuhan riil masyarakat terdampak. Laporan tersebut mencakup data pengungsi, tingkat kerusakan, serta kebutuhan logistik dan pelayanan sosial, yang menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan, alokasi anggaran, serta bentuk intervensi yang diperlukan.

Koordinasi vertikal juga tercermin dari kemampuan Dinas Sosial dalam

menindaklanjuti setiap feedback yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat atas laporan yang telah disampaikan. Arahan, rekomendasi, maupun kebijakan yang diturunkan dari level pemerintahan di atasnya kemudian diimplementasikan secara operasional di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Dinas Sosial secara aktif meminta arahan tindakan untuk pengendalian situasi bencana guna memastikan bahwa langkah-langkah penanganan yang dilakukan di daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga penanganan bencana dapat berlangsung secara terkoordinasi, efektif, dan berjenjang.

#### **Membuat laporan berkala kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang Kondisi di Lapangan.**

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur secara rutin dan terstruktur menyusun serta mengirim laporan berkala kepada Pemerintah Provinsi NTT, BPBD Provinsi, dan Kementerian Sosial sebagai bagian dari koordinasi vertikal dalam penanganan bencana. Pelaporan ini dilakukan melalui berbagai saluran resmi seperti aplikasi SIGAP Kemensos, WhatsApp group koordinasi, email dinas, surat resmi, hingga rapat daring saat situasi meningkat. Laporan yang disampaikan mencakup Lapsit harian, data wilayah terdampak, jumlah pengungsi, perkembangan posko, penyaluran logistik, serta dokumentasi

kegiatan penanganan bencana. Penyampaian laporan yang komprehensif ini membantu pemerintah yang lebih tinggi mendapatkan gambaran cepat dan menyeluruh mengenai kondisi di lapangan.

Sebelum laporan dikirimkan, proses penyusunan selalu didahului oleh pengumpulan dan verifikasi data secara berjenjang. Data awal diperoleh dari petugas lapangan, operator posko, dan perangkat kecamatan/desa untuk memastikan informasi yang masuk aktual dan relevan. Selanjutnya TAGANA, Tim Reaksi Cepat (TRC), dan Seksi terkait memeriksa konsistensi dan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan. Tahap akhir dilakukan oleh Kepala Bidang yang memastikan kelengkapan laporan, kesesuaian format pelaporan, serta validitas setiap informasi sebelum diteruskan kepada Pemprov NTT, BPBD, maupun Kemensos.

Keandalan dan ketepatan waktu laporan menjadi aspek krusial dalam keseluruhan proses penanganan bencana. Laporan yang akurat memungkinkan pemerintah provinsi dan pusat mengambil langkah cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Kecepatan respons dari provinsi dan Kemensos, baik berupa tambahan logistik, penugasan personel, maupun dukungan kebijakan, sangat bergantung pada kualitas pelaporan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten

Flores Timur. Dengan mekanisme pelaporan yang sistematis, verifikasi yang ketat, dan koordinasi yang solid, penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika situasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur secara rutin dan terstruktur menyusun serta mengirim laporan berkala kepada Pemprov NTT, BPBD, dan Kementerian Sosial melalui berbagai saluran resmi (SIGAP, WhatsApp grup, email, surat resmi, rapat daring), yang berisi Lapsit harian, data wilayah terdampak, jumlah pengungsi, penyaluran logistik, assessment kebutuhan, dokumentasi, dan koordinasi lintas instansi; sebelum dikirim, data diverifikasi berjenjang oleh petugas lapangan, TAGANA, TRC, dan kepala bidang sehingga akurat dan lengkap—keandalan serta ketepatan waktu laporan ini krusial untuk memungkinkan respons provinsi dan pusat yang cepat, tepat sasaran, dan efektif dalam penanganan bencana.

#### **Menindak lanjuti feedback atas laporan kepada pemerintah pusat**

Penanganan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat berjalan efektif karena dilaksanakan dengan mematuhi arahan teknis dari Kementerian Sosial. Setiap langkah penanganan selalu diselaraskan dengan

pedoman pusat sehingga standar pelayanan, prosedur distribusi bantuan, dan mekanisme pengelolaan pengungsi dilakukan secara seragam dan terukur. Kepatuhan ini memastikan bahwa seluruh proses penanganan bencana tidak hanya sesuai regulasi nasional, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara tepat dan terarah.

Efektivitas penanganan juga ditopang oleh respons cepat terhadap setiap instruksi lanjutan dari Kemensos. Begitu pusat memberikan evaluasi, permintaan data tambahan, maupun arahan perbaikan layanan, seluruh unit teknis seperti Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Seksi PKBS, TAGANA, TRC, dan Seksi Logistik langsung bergerak melakukan penyesuaian. Mereka menyalurkan bantuan tambahan, memperbarui data pengungsi, menyesuaikan tata kelola posko, serta memastikan pelayanan tetap memenuhi standar nasional. Sinergi antarseksi inilah yang membuat dinamika kebutuhan di lapangan dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Tidak kalah penting, penyediaan bukti administratif dan dokumentasi yang lengkap turut memperkuat akuntabilitas Dinas Sosial dalam setiap tahap penanganan bencana. Laporan pelaksanaan, rekap logistik, dokumentasi kegiatan, serta notulen rapat disusun secara sistematis sehingga pemerintah pusat dapat dengan mudah melakukan

monitoring dan evaluasi. Dengan dokumentasi yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan, intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, koordinasi pusat-daerah semakin kuat, dan efektivitas keseluruhan penanganan bencana semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penanganan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berjalan efektif berkat kepatuhan terhadap arahan teknis Kemensos, respons cepat terhadap instruksi lanjutan, serta penyediaan bukti administratif yang lengkap dan akuntabel. Seluruh unit—mulai dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Seksi PKBS, TAGANA, TRC, hingga Seksi Logistik—bekerja sinergis dalam menyalurkan bantuan, mengelola posko, memperbarui data, dan melakukan dokumentasi, sehingga pelayanan kepada pengungsi tetap sesuai standar nasional. Kepatuhan pada pedoman, koordinasi internal yang solid, serta dokumentasi yang terstruktur memastikan intervensi pemerintah berlangsung tepat sasaran, memudahkan monitoring pusat, dan memperkuat efektivitas keseluruhan penanganan bencana.

#### **Memintah arahan tindakan untuk pengendalian situasi**

Koordinasi vertikal dalam penanganan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki terbukti berjalan

sangat efektif, terlihat dari respons cepat Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam menyampaikan kondisi darurat kepada Pemerintah Provinsi NTT maupun Kementerian Sosial. Setiap perkembangan situasi—baik peningkatan aktivitas gunung, bertambahnya jumlah pengungsi, maupun kebutuhan mendesak di lapangan—selalu disertai dengan data pendukung yang lengkap, akurat, dan telah diverifikasi sebelum dikirimkan ke tingkat provinsi dan pusat. Ketepatan waktu dan kelengkapan informasi ini memungkinkan pemerintah yang lebih tinggi untuk segera mengeluarkan instruksi yang relevan sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Setelah menerima arahan dari Pemerintah Provinsi NTT atau Kemensos, Dinas Sosial dengan sigap menindaklanjutinya melalui mekanisme penyampaian instruksi yang jelas dan terstruktur. Jalur komunikasi resmi seperti surat dinas, aplikasi pelaporan bencana, serta koordinasi langsung via grup komunikasi maupun telepon memastikan setiap kebijakan pusat dapat diteruskan dengan baik ke pemerintah kecamatan, desa, hingga petugas lapangan seperti TAGANA dan TRC. Rantai koordinasi yang tertata ini membuat seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, menyesuaikan operasional posko, memperbarui data pengungsi, dan

memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dampak dari koordinasi vertikal yang efektif ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Bantuan sosial maupun logistik dapat disalurkan dengan lebih cepat dan merata, pelayanan posko menjadi lebih tertib dan terorganisasi, serta informasi yang diberikan kepada warga jauh lebih jelas dan konsisten. Masyarakat tidak lagi kebingungan ketika terjadi perubahan kebijakan karena semua informasi disampaikan secara terbuka dan tepat waktu. Dengan demikian, keseluruhan proses penanganan bencana menjadi lebih terarah, akurat, dan memenuhi kebutuhan nyata para pengungsi, sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Koordinasi vertikal dalam penanganan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki berjalan sangat efektif, tercermin dari respons cepat Dinas Sosial Flores Timur dalam menyampaikan kondisi darurat, melampirkan data pendukung yang lengkap dan terverifikasi, serta menindaklanjuti setiap arahan dari Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Sosial sehingga keputusan dapat diambil secara tepat waktu. Penyampaian informasi melalui jalur komunikasi resmi, dilanjutkan dengan distribusi instruksi hingga ke pemerintah

kecamatan dan desa, memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar diterapkan di lapangan. Masyarakat pun merasakan manfaat nyata berupa distribusi bantuan yang lebih cepat, pelayanan posko yang lebih tertib, serta informasi yang lebih jelas dan konsisten, sehingga keseluruhan proses penanganan bencana menjadi lebih terarah, akurat, dan tepat sasaran.

### **Koordinasi Horizontal**

Aspek koordinasi horizontal dalam peran Dinas Sosial sebagai koordinator penanganan bantuan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur tercermin melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Dinas Sosial secara rutin melaksanakan rapat kerja gabungan lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur relawan dan organisasi kemanusiaan. Rapat kerja ini berfungsi sebagai forum koordinatif untuk menyamakan persepsi, membagi peran dan tanggung jawab, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan bantuan bencana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Koordinasi horizontal juga diwujudkan melalui pembentukan satuan kerja bersama lintas sektor di lokasi bencana untuk melaksanakan tindakan

tanggap darurat secara langsung. Dalam satuan kerja ini, setiap instansi berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sementara Dinas Sosial berperan sebagai penghubung dan pengoordinasi utama. Kolaborasi antarinstansi juga terlihat dalam pengelolaan informasi dan pemetaan kondisi kedaruratan, termasuk pendataan pengungsi, distribusi bantuan, serta identifikasi wilayah rawan. Sinergi dalam pengelolaan informasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data, sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

#### **Melaksanakan rapat kerja gabungan lintas sector secara rutin**

Koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana telah berjalan efektif, rutin, dan terintegrasi. Rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BMKG, PUPR, TNI, POLRI, camat, kepala desa, TRC, dan Tagana memungkinkan penyatuan informasi secara menyeluruh. Dalam rapat tersebut, langkah-langkah tanggap darurat ditetapkan bersama, tugas tiap instansi dibagi secara jelas, dan strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.

Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi diterapkan secara nyata, terutama dalam distribusi bantuan,

pelayanan medis, dan logistik. Implementasi yang tepat waktu dan sesuai sasaran ini memastikan bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana. Efisiensi penyaluran serta ketepatan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait.

Efektivitas komunikasi antarinstansi dan respons cepat terhadap perkembangan situasi memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan koordinasi yang baik, tumpang tindih tugas dapat diminimalkan, dan sistem tanggap darurat menjadi lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung terstruktur, terkontrol, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana telah berjalan efektif, rutin, dan terintegrasi. Rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak—BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BMKG, PUPR, TNI, POLRI, camat, kepala desa, TRC, dan Tagana—mampu menyatukan informasi, menetapkan langkah tanggap darurat,

membagi tugas secara jelas, serta menyesuaikan strategi berdasarkan situasi di lapangan. Implementasi keputusan rapat secara nyata, baik dalam distribusi bantuan, pelayanan medis, maupun logistik, memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penanganan bencana. Efektivitas komunikasi dan respons cepat antarinstansi juga memperkuat sinergi, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan menjadikan sistem tanggap darurat lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.

### **Membentuk Satuan Kerja Bersama Lintas Sektor di Lokasi Bencana untuk Tindakan**

Keberadaan satuan kerja (Satker) atau tim gabungan lintas sektor di lokasi pengungsian dan daerah terdampak bencana telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Satker yang melibatkan Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, kepolisian, LSM, serta pihak terkait lainnya mampu menangani kebutuhan mendesak pengungsi secara terpadu. Layanan yang diberikan mencakup distribusi logistik, pelayanan medis, evakuasi, pengamanan, dan perlindungan masyarakat, sehingga kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi dengan baik.

Keaktifan dan koordinasi lintas sektor dalam Satker mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan tumpang tindih tugas antarinstansi. Dengan pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang efektif, setiap langkah penanganan bencana dapat dijalankan secara terstruktur dan sesuai rencana. Hal ini memastikan bahwa bantuan dan layanan yang diberikan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Respons cepat Satker terhadap situasi yang dinamis di lapangan meningkatkan efektivitas penanganan bencana secara keseluruhan. Dengan kemampuan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi terkini, Satker tidak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan pengungsi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi terkait. Pendekatan ini mendukung pemulihan kondisi pengungsi secara optimal dan memastikan stabilisasi wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan satuan kerja (Satker) atau tim gabungan lintas sektor di lokasi pengungsian dan daerah terdampak bencana telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Satker yang melibatkan Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan,

kepolisian, LSM, serta pihak terkait lainnya, mampu menangani kebutuhan mendesak seperti distribusi logistik, pelayanan medis, evakuasi, pengamanan, dan perlindungan masyarakat secara terpadu. Keaktifan dan koordinasi lintas sektor mempercepat pengambilan keputusan, meminimalkan tumpang tindih tugas, serta memastikan bantuan dan layanan tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan respons cepat terhadap situasi dinamis di lapangan, Satker tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan bencana, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pemulihan kondisi pengungsi secara optimal.

#### **Kolaborasi mengelola informasi dan pemetaan kondisi kedaruratan**

Penyusunan dan pemanfaatan peta kondisi darurat serta informasi bencana yang dikelola secara kolaboratif oleh berbagai instansi telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peta dan data yang disajikan akurat, mudah dipahami, konsisten, dan selalu diperbarui, sehingga masyarakat memperoleh gambaran jelas mengenai kondisi wilayah terdampak dan dapat menyesuaikan tindakan mereka dengan cepat.

Informasi yang lengkap mencakup lokasi terdampak, jalur evakuasi, posko bantuan, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan akses yang mudah dan pemahaman yang jelas,

masyarakat dapat bertindak secara cepat dan aman selama bencana. Hal ini memastikan keselamatan pengungsi lebih terjamin dan membantu mereka dalam merencanakan langkah-langkah tanggap darurat secara tepat.

Pemanfaatan informasi ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Dengan data yang konsisten, distribusi bantuan dapat dilakukan tepat sasaran, respon terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tim penanganan bencana meningkat. Akibatnya, efektivitas penanganan bencana dan keselamatan masyarakat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan dan pemanfaatan peta kondisi darurat serta informasi bencana yang dikelola secara kolaboratif oleh berbagai instansi telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peta dan data yang akurat, mudah dipahami, konsisten, dan selalu diperbarui memudahkan masyarakat mengetahui lokasi terdampak, jalur evakuasi, posko bantuan, serta kebutuhan mendesak, sehingga mereka dapat bertindak cepat dan aman. Pemanfaatan informasi ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pengambilan keputusan, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tim penanganan bencana, sehingga efektivitas dan keselamatan dalam penanganan bencana meningkat secara signifikan.

## KESIMPULAN

Dalam konteks penanganan bencana yang ditandai oleh kondisi darurat, ketidakpastian, dan tuntutan respons cepat, koordinasi pemerintahan menjadi kemampuan strategis yang menentukan keberhasilan penyaluran bantuan. Peran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai koordinator utama dalam penanganan bantuan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki menunjukkan bahwa koordinasi vertikal dan horizontal yang dijalankan secara konsisten dan terstruktur mampu memastikan efektivitas respons pemerintah. Koordinasi vertikal, melalui pelaporan berkala kepada pemerintah provinsi dan pusat serta permintaan arahan pengendalian situasi, memperkuat keterpaduan kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Sementara itu, koordinasi horizontal yang diwujudkan melalui rapat kerja lintas sektor, pembentukan satuan kerja bersama, serta pengelolaan informasi dan pemetaan kondisi kedaruratan mendorong sinergi antarlembaga dan mempercepat tindakan di lapangan. Dengan demikian, koordinasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

administratif, tetapi menjadi fondasi utama bagi penanganan bencana yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2022). *Letak Astronomis Indonesia adalah 6° LU - 11° LS 95° BT - 141° BT, Pahami Pengaruhnya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4910873/letak-astronomis-indonesia-adalah-6-lu-11-ls-95-bt-141-bt-pahami-pengaruhnya?page=4>.
- Desember, P. E., Navalina, I., Realita, A., & Prastowo, T. (2023). ANALISIS ANOMALI GRAVITASI GUNUNG SEMERU. *Inovasi Fisika Indonesia*, 12(1), 63–74.
- HanifaH, N. (2021). *ANALISIS RELOKASI HIPOSENTER GEMPABUMI DI ZONA FLORES BACK ARC THRUST FAULT MENGGUNAKAN METODE DOUBLE DIFFERENCE*. <https://www.bnpb.go.id/>. (2024). <https://www.bnpb.go.id/>. BNPB.
- Karso, J. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DI PELABUHAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA*

*MEWUJUDKAN*

*KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DALAM LINGKUNGAN  
KEPELABUHAN.* Insania.

Kurniawan, R. (2022). *Ini 10 Negara  
Terbesar di Dunia, Indonesia Posisi  
Berapa?*

[https://www.kompas.com/tren/R  
ead/2022/02/27/174500465/Ini-10-  
Negara-Terbesar-Di-Dunia-  
Indonesia-Posisi-Berapa-](https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/27/174500465/Ini-10-Negara-Terbesar-Di-Dunia-Indonesia-Posisi-Berapa-)

[https://www.kompas.com/tren/read/  
2022/02/27/174500465/ini-10-  
negara-terbesar-di-dunia-indonesia-](https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/27/174500465/ini-10-negara-terbesar-di-dunia-indonesia-)

posisi-berapa-

Syafiie, I. K. (2011). *Sistem  
Pemerintahan Indonesia.* Rineka  
Cipta.

Tempo. (2023). *7 Fakta Menarik  
Indonesia.*

[https://www.tempo.co/internasio  
nal/7-fakta-menarik-indonesia-  
232055.](https://www.tempo.co/internasional/7-fakta-menarik-indonesia-232055)

[https://www.tempo.co/internasional  
/7-fakta-menarik-indonesia-232055](https://www.tempo.co/internasional/7-fakta-menarik-indonesia-232055)

Ulber Silalahi. (2012). *Metode Penelitian  
Sosial.* Refika Aditama.